



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAITUL IHWAN
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 208701

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 645 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 850.000.000		
2. Tanah Seluas 875 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000		
3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	23.094.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	337.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.110.094.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.110.094.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FADRINSYAH ANWAR
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 432368

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 810.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 165.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 158.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.210.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 22.708.057

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.003.418.057

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.003.418.057

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **GEDE PASEK SUARDIKA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR JENDERAL**
3. NHK : **210317**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 4.347.500.000**

1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 28.29 m2/28.29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 907.500.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
10. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
11. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
12. Tanah Seluas 104 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL



SENDIRI Rp. 150.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/21 m2 di KAB / KOTA

BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **501.500.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000

2. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

151.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **9.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.669.604.945****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **6.527.604.945****III. HUTANG** Rp. **86.400.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **6.441.204.945**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Jujun Endah Wahjuningrum
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 192357

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 9.209.000.000

1. Tanah Seluas 966 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000
7. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.224.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 45.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 135.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.100.287.900**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 823.559.320





F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.313.347.220
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.313.347.220

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ROSITA SINAGA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**
3. NHK : **254838**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.443.678.000

1. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA SAMOSIR, WARISAN Rp. 19.158.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA SAMOSIR, WARISAN Rp. 21.012.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/222 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.407.296.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 156.468.000
5. Tanah Seluas 2232 m2 di KAB / KOTA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp. 227.276.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 612.468.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 184.000.000

1. MOTOR, HONDA GL PRO SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA VL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 400.902.994**D. SURAT BERHARGA** Rp. 400.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 876.018.991**F. HARTA LAINNYA** Rp. 150.000.000

**Sub Total** Rp. 4.454.599.985



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.454.599.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAHATTUA P. SIMATUPANG
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 214344

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.993.056.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.552.672.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m<sup>2</sup>/72 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.258.400.000
3. Tanah Seluas 188 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 181.984.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 516.335.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2008, HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 109.350.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP S.C. HDTF Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 379.485.000
4. LAINNYA, KAWASAKI STX 1100 JETSKI Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 309.900.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 996.679.045

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 4.815.970.045

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.815.970.045

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.